

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Gender dan permasalahan yang ada didalamnya bukan membahas mengenai jenis kelamin perempuan dan laki-laki melainkan bagaimana agar adanya persamaan diantaranya tanpa adanya perbedaan, mendapatkan keadilan dan persamaan hak, karena gender bukan merupakan suatu hal yang kodrati melainkan pandangan masyarakat terhadap laki-laki dan perempuan beserta kedudukannya. Perempuan kerap kali menjadi korban, baik korban dalam kekerasan rumah tangga, pelecehan seksual, perkosaan dan lain sebagainya, di mana pada intinya lebih mendiskriminasikan perempuan, padahal sekarang adalah zaman emansipasi wanita, artinya seorang perempuan tidak boleh lagi dijajah, bebas akan hak-haknya dan tidak dapat dibatasi oleh apapun dan dalam keadaan apapun (Ismail et al, 2020). Diskriminasi gender diketahui menyebabkan munculnya tuntutan dan upaya-upaya untuk mencapai kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan di segala bidang kehidupan khususnya juga di dalam masyarakat (Judiasih, et al., 2022).

Pada hakikatnya, kesetaraan gender merupakan salah satu pilar penting dalam pembangunan berkelanjutan yang tercermin dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*) poin kelima, yaitu mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan. Namun, isu gender di Indonesia mencerminkan ketidaksetaraan yang masih bersifat merata, terutama terlihat dalam akses pendidikan, peluang pekerjaan, dan dalam pengambilan keputusan penting dalam masyarakat (KemenPPPA, 2022).

Oleh karena itu, ketidaksetaraan gender masih menjadi tantangan besar di Indonesia, meskipun berbagai upaya telah dilakukan untuk mengatasinya. Sebagaimana survei yang dilakukan *Global Gender Gap Index 2023* menunjukkan penurunan peringkat dan tingkat kesetaraan gender yang masih jauh dari penuh dialami oleh Indonesia. Dimana, pada tahun 2023 Indonesia berada di peringkat 87 dan mengalami penurunan menjadi peringkat 100 yaitu mencapai 69,7 persen untuk kesetaraan gender secara global. Hal ini menunjukkan masih adanya pekerjaan yang harus dilakukan untuk mencapai kesetaraan penuh.

Fenomena isu kesetaraan gender juga terlihat dari berbagai kasus di Indonesia, seperti adanya data yang menunjukkan bahwa perempuan di Indonesia masih menghadapi diskriminasi yang meluas di berbagai sektor, termasuk dunia kerja, pendidikan, dan ruang publik. Dalam dunia kerja, ketidaksetaraan gender terlihat dari diskriminasi yang dialami buruh perempuan. Misalnya, pada tahun 2024, sebuah perusahaan manufaktur di Jawa Barat memecat 150 buruh perempuan yang mengajukan protes atas kebijakan lembur yang tidak manusiawi. Perempuan tersebut juga menghadapi pelanggaran hak-hak mendasar, seperti cuti melahirkan dan hak menyusui, yang menyebabkan risiko kesehatan fisik dan mental.

Sementara, di sektor pendidikan, diskriminasi berbasis gender juga terjadi. Seorang mahasiswi di Sumatera Barat mengaku tidak diterima magang di sebuah perusahaan teknologi hanya karena dia perempuan. Perusahaan menganggap bahwa perempuan tidak mampu menjalani tuntutan kerja berat, menunjukkan bahwa stereotip gender masih mengakar kuat. Hal ini berdampak negatif pada kesempatan perempuan untuk berkembang di bidang yang didominasi laki-laki, seperti

teknologi. Selain itu, kekerasan berbasis gender menjadi isu yang semakin mengemuka di lingkungan kampus. Di Jakarta, seorang dosen dilaporkan atas tindakan pelecehan seksual terhadap beberapa mahasiswi. Kasus ini menyoroti kerentanan perempuan dalam lingkungan pendidikan, terutama ketika pelaku memanfaatkan posisi kekuasaan untuk menekan korban. Sehingga dapat disimpulkan bahwa berbagai kasus tersebut menunjukkan ketidaksetaraan gender masih menjadi masalah struktural yang memerlukan perhatian serius.

Secara global, pencapaian kesetaraan dan keadilan gender diukur menggunakan beberapa indeks utama yaitu *Global Gender Gap Index* (GGGI), *Gender Inequality Index* (GII), *Human Development Index* (HDI), dan *Gender Development Index* (GDI). Sementara di Indonesia, indikator utama pencapaian kesetaraan dan keadilan gender yaitu Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Menurut BPS (2023), IPG adalah indeks yang digunakan untuk mengukur pencapaian dimensi dan variabel yang sama seperti IPM, tetapi mengungkapkan ketidakadilan pencapaian laki-laki dan perempuan. Metodologi penghitungan IPG, menggunakan UNDP (United Nations Development Programs) tahun 2010 didasarkan pada tiga dimensi utama pembangunan gender.

IPG berfungsi sebagai indikator untuk mengevaluasi status kemampuan dasar penduduk, yang mencakup angka harapan hidup, angka harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, dan pengeluaran per kapita. IPG digunakan untuk mengukur akses terhadap sumber daya yang mendukung standar hidup yang layak (Kertati, 2021). Secara khusus IPG, mengindikasikan apabila perolehan nilai semakin jauh

atau semakin rendah dari angka 100 maka semakin tinggi kesenjangan (Renstra DP3AP2 Provinsi Jambi, 2016). Sementara itu, IDG digunakan untuk menilai sejauh mana keterlibatan dan peran perempuan dalam bidang politik dan ekonomi. IDG mencerminkan partisipasi perempuan dalam kegiatan sehari-hari, terutama di bidang politik, ekonomi, dan pengambilan keputusan publik, serta memberikan gambaran kondisi ekonomi saat ini (Lestari et al., 2020).

Namun dalam penelitian ini, fokus utama diarahkan pada IPG sebagai variabel dependen, karena IPG dinilai lebih stabil secara statistik, memiliki data yang lengkap, dan lebih representatif dalam menggambarkan kesetaraan gender dari sisi kualitas hidup dasar masyarakat. Sebelumnya, penelitian ini juga mempertimbangkan IDG sebagai variabel dependen. Namun, hasil uji statistik menunjukkan bahwa IDG tidak memberikan pengaruh signifikan secara simultan terhadap variabel-variabel independen yang digunakan. Oleh karena itu, demi menjaga validitas dan relevansi analisis, penelitian ini difokuskan pada IPG yang secara teori dan statistik lebih stabil dan mewakili capaian pembangunan gender dalam dimensi pendidikan, kesehatan, dan ekonomi.

Pemilihan IPG sebagai satu-satunya variabel dependen juga diperkuat oleh kelengkapan data serta keterkaitannya dengan variabel-variabel bebas dalam penelitian ini, seperti tingkat kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, angka partisipasi sekolah, angka buta huruf, dan tingkat partisipasi angkatan kerja. Fokus ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kesetaraan gender di wilayah studi.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Jager dan Rohwer (2009) menyebutkan bahwa indeks pengukuran untuk kesetaraan gender cenderung menggunakan skala "satu arah" yang hanya mengukur seberapa dekat perempuan mencapai paritas dengan laki-laki, tanpa mempertimbangkan jika ada kesenjangan yang menguntungkan perempuan. Hal ini berarti indeks-indeks tersebut cenderung hanya mengukur kesenjangan yang menguntungkan laki-laki, tanpa mempertimbangkan adanya kesenjangan yang mungkin menguntungkan perempuan di beberapa bidang, atau bagaimana faktor lain mempengaruhi hasil pengukuran tersebut. Adanya skala satu arah dalam pengukuran kesetaraan gender inilah yang menjadi menarik untuk dikaji lebih lanjut. Jager dan Rohwer (2009) menambahkan bahwa banyak faktor lain yang berperan dalam menentukan nilai suatu indeks kesetaraan gender, yang seringkali tidak terukur dalam pendekatan yang hanya membandingkan laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu, peneliti akan melakukan kajian pada faktor-faktor lain yang mempengaruhi indeks pencapaian kesetaraan gender, khususnya pada Provinsi Jambi.

Provinsi Jambi dipilih sebagai lokasi penelitian karena menunjukkan variasi capaian IPG yang menarik antar kabupaten/kota, meskipun secara agregat provinsi mencatat IPG sedikit di atas rata-rata nasional. Data dari BPS menunjukkan bahwa beberapa daerah seperti Kota Jambi dan Kota Sungai Penuh memiliki capaian IPG yang tinggi, sedangkan beberapa kabupaten seperti Tebo dan Batanghari menunjukkan capaian yang lebih rendah. Variasi ini memperlihatkan adanya perbedaan pembangunan gender secara spasial, yang menarik untuk dianalisis lebih lanjut. Berikut perolehan nilai IPG yang dapat dilihat pada Tabel 1.1 di bawah ini:

Tabel 1.1 Capaian IPG di Kabupaten/Kota Provinsi Jambi dan IPG Nasional

Wilayah	Indeks Pembangunan Gender (IPG)				
	2019	2020	2021	2022	2023
Nasional	91.07	91.06	91.27	91.63	91.85
Provinsi Jambi	88.44	88.41	88.62	88.95	89.29
Kerinci	86.68	86.65	86.81	87.03	87.15
Merangin	88.01	88.14	88.24	88.35	88.82
Sarolangun	90.67	90.55	90.81	91.65	91.38
Batanghari	85.17	85.01	85.23	85.44	85.57
Muaro Jambi	80.29	80.08	81.06	81.55	82.12
Tanjung Jabung Timur	87.76	87.50	87.43	87.68	87.90
Tanjung Jabung Barat	85.68	85.66	85.79	86.17	86.51
Tebo	90.23	90.06	90.40	90.92	91.63
Bungo	88.63	88.54	88.49	88.61	88.83
Kota Jambi	94.14	94.03	94.42	94.80	95.01
Kota Sungai Penuh	94.44	94.31	94.41	94.49	94.54

Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia 2024

Berdasarkan Tabel 1.1 di atas, terlihat bahwa capaian rata-rata IPG kabupaten dan kota di Provinsi Jambi sangat baik karena sudah mulai mendekati mendekati angka 100, yang artinya di Kabupaten dan Kota Provinsi Jambi semakin jauh dari kesenjangan gender. Secara keseluruhan, meskipun terdapat beberapa kemajuan dalam pencapaian IPG di Provinsi Jambi, data ini mengindikasikan perlunya intervensi kebijakan yang lebih terfokus dan strategis untuk mengurangi ketimpangan gender antara kabupaten/kota di Provinsi Jambi, serta untuk mencapai kesetaraan dan pemberdayaan gender yang lebih merata.

Sehingga hal ini yang mendasari peneliti untuk memilih Provinsi Jambi sebagai objek kajian karena adanya perbedaan yang signifikan dalam IPG di antara Kabupaten dan Kota yang ada, meskipun Provinsi Jambi menunjukkan angka IPG yang sedikit lebih tinggi dari rata-rata nasional. Marmoah (2017) menyebutkan bahwa di Kota Jambi khusus dalam pendidikan diketahui masih terdapat ketidaksetaraan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat antara laki-laki dan

perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa upaya untuk meningkatkan akses pendidikan bagi perempuan perlu terus ditingkatkan. Selain itu, beberapa kabupaten seperti Tebo dan Kota Sungai Penuh menunjukkan capaian yang masih rendah, menandakan adanya ketimpangan yang perlu ditangani lebih lanjut. Oleh karena itu, Provinsi Jambi menjadi pilihan yang relevan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi IPG, serta memberikan kontribusi pada upaya kebijakan untuk mengurangi kesenjangan gender di daerah tersebut.

Umumnya, tingkat kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, dan pendidikan memiliki pengaruh yang besar terhadap tidak tercapainya kesetaraan gender. Sebagaimana diungkapkan oleh Klasen (2002) menunjukkan bahwa kemiskinan sering kali mempengaruhi perempuan lebih keras daripada laki-laki, dengan dampak negatif yang lebih besar terhadap akses perempuan terhadap pendidikan dan layanan kesehatan. Suatu daerah dengan tingkat kemiskinan yang tinggi menunjukkan perempuan sering kali terhambat dalam mengakses pendidikan yang setara dengan laki-laki, sehingga membatasi peluang mereka untuk berpartisipasi dalam pasar kerja atau mendapatkan pekerjaan yang layak. Sehingga, kemiskinan menjadi faktor penghalang utama dalam pemberdayaan perempuan, memaksa mereka untuk terlibat dalam pekerjaan berpendapatan rendah dan terbatas dalam peran sosial dan ekonomi. Studi sebelumnya menunjukkan bahwa perempuan di keluarga miskin cenderung mengalami kendala dalam melanjutkan pendidikan, yang berdampak negatif pada tingkat partisipasi mereka dalam angkatan kerja (Widyastuti, 2021).

Kabeer (2019) menekankan bahwa kemiskinan dan ketidaksetaraan ekonomi sangat mempengaruhi pemberdayaan perempuan, dan bahwa pemberdayaan ekonomi perempuan dapat mengurangi kemiskinan serta ketidaksetaraan secara lebih efektif daripada kebijakan yang hanya berfokus pada kesejahteraan. Pada penelitian lain juga menyebutkan bahwa, kemiskinan membatasi penentuan nasib sendiri perempuan dan membatasi partisipasi mereka dalam bidang ekonomi, sosial, dan politik. Dan sudah diakui secara luas bahwa kemiskinan merupakan pendorong mendasar ketidaksetaraan gender, yang menghambat pemberdayaan ekonomi dan sosial perempuan (Dellie, et al., 2024).

Kemudian, pertumbuhan ekonomi suatu wilayah atau yang biasa diukur dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), juga berperan penting dalam menciptakan kesempatan kerja yang inklusif dan ramah gender guna mencapai kesetaraan gender (Astuti & Priyono, 2020). Wilayah dengan pertumbuhan ekonomi yang pesat sering kali menciptakan lebih banyak peluang untuk perempuan dalam bidang pekerjaan dan pendidikan, sementara di daerah dengan pertumbuhan ekonomi yang lambat, perempuan lebih mungkin terjebak dalam pekerjaan dengan upah rendah atau tanpa akses ke pendidikan berkualitas. Duflo (2012) menjelaskan bahwa negara dengan tingkat PDRB yang lebih tinggi cenderung memiliki lebih banyak kebijakan yang mendukung kesetaraan gender, seperti akses pendidikan dan partisipasi perempuan dalam dunia kerja.

Pamelia dan Ratih (2022) juga menegaskan bahwa, pertumbuhan ekonomi merupakan indikator penting dari pencapaian pembangunan suatu negara, yang terkait erat dengan kesejahteraan dan kualitas hidup warga negaranya secara

keseluruhan. Strategi pembangunan ekonomi yang kuat, bersama dengan pemanfaatan sumber daya manusia yang efisien, memainkan peran penting dalam meningkatkan PDRB suatu wilayah tertentu. Dengan mendorong lingkungan yang kondusif untuk kegiatan ekonomi, wilayah dapat mengalami peningkatan produktivitas, tingkat pendapatan yang lebih tinggi, dan peningkatan standar hidup.

Selain itu, Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/ sederajat menjadi indikator penting lainnya. Tingginya angka partisipasi sekolah dapat menunjukkan bahwa perempuan mendapatkan kesempatan pendidikan yang setara dengan laki-laki, sedangkan angka partisipasi yang rendah bisa menjadi indikasi adanya diskriminasi gender dalam akses pendidikan. Sebuah studi oleh Filmer (2000) menunjukkan bahwa rendahnya angka partisipasi sekolah, terutama di tingkat menengah dan tinggi, secara langsung berkorelasi dengan rendahnya kesempatan kerja bagi perempuan, serta dengan perbedaan gender dalam berbagai sektor kehidupan. Rendahnya APS perempuan mengurangi peluang mereka untuk mendapatkan pekerjaan yang layak dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan (Suryadi, 2019). *United Nations Women* (2022) menyebutkan bahwa meskipun pendidikan telah meningkat, kesetaraan dalam penghasilan dan kesempatan kepemimpinan tetap stagnan. Hal ini relevan dengan Angka Partisipasi Sekolah di Provinsi Jambi yang bisa memengaruhi IPG.

Hal ini juga terkait erat dengan angka buta huruf, yang mana perempuan dengan tingkat literasi rendah akan lebih sulit memperoleh kesempatan untuk bekerja atau mengambil peran kepemimpinan dalam masyarakat, sehingga angka buta huruf menjadi indikator penting lainnya yang akan diteliti. Penelitian oleh

Schultz (1993) menekankan bahwa tingkat buta huruf yang tinggi di kalangan perempuan membatasi kemampuan mereka untuk berpartisipasi dalam ekonomi formal dan pengambilan keputusan dalam keluarga maupun masyarakat. angka buta huruf yang tinggi pada perempuan tetap menjadi kendala pembangunan gender, terutama di daerah perdesaan.

Partisipasi angkatan kerja perempuan, yang mencerminkan kontribusi ekonomi perempuan, sering kali terkendala oleh stereotip gender dan beban pekerjaan domestik (Putri, 2020). Sehingga, partisipasi angkatan kerja juga menjadi indikator penting dalam mengukur pemberdayaan perempuan. Di banyak negara, perempuan masih menghadapi hambatan untuk memasuki pasar kerja, baik karena stereotip gender maupun kurangnya dukungan untuk ibu bekerja, seperti kebijakan cuti melahirkan atau fasilitas penitipan anak. Penelitian oleh Assaad (1997) mengidentifikasi bahwa di banyak negara berkembang, meskipun perempuan memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi, mereka masih menghadapi hambatan besar untuk masuk ke pasar kerja, seperti diskriminasi gender dan kurangnya kebijakan yang mendukung pekerja perempuan.

Laporan *World Bank* (2020) mengidentifikasi bahwa kesetaraan gender dalam pekerjaan dan pemberdayaan perempuan di pasar kerja sangat penting untuk mendorong kemajuan pembangunan ekonomi. Akses ke pendidikan dan pelatihan keterampilan menjadi faktor utama yang dapat mengurangi ketidaksetaraan gender. Chakravarty (2022) menunjukkan bahwa globalisasi dan perubahan ekonomi global mempengaruhi perempuan dengan cara yang kompleks, baik positif maupun negatif. Meskipun perempuan lebih banyak terlibat dalam sektor ekonomi global,

mereka tetap mengalami diskriminasi dalam hal upah, kesempatan, dan hak-hak kerja. Temuan ini dapat menjelaskan tantangan yang dihadapi oleh perempuan di Provinsi Jambi dalam partisipasi angkatan kerja dan pertumbuhan ekonomi, yang bisa berkontribusi terhadap perbedaan nilai IPG antar Kabupaten/Kota. Dengan demikian indikator ini sangat relevan untuk mengukur faktor lain yang dapat berpengaruh langsung pada IPG di Kabupaten/Kota berbeda.

Penelitian terdahulu lainnya seperti yang dilakukan oleh Dellie, et al (2024) menunjukkan bahwa pemberdayaan perempuan di Ethiopia dipengaruhi oleh faktor-faktor individu seperti tingkat pendidikan dan status kekayaan serta lokasi geografis. Barnat, et al (2019) menemukan bahwa dimensi ekonomi memberikan kontribusi yang sangat signifikan terhadap variasi dalam indeks ketidaksetaraan gender. Pengukuran ketidaksetaraan dalam partisipasi ekonomi dan tenaga kerja memiliki dampak besar terhadap hasil yang diberikan pada indeks. Selain itu, faktor lain seperti pendidikan, kesehatan, dan kondisi sosial juga memainkan peran penting dalam menentukan tingkat ketidaksetaraan gender. Penelitian yang dilakukan oleh Singh, et al (2023) menemukan adanya perbedaan signifikan antara laki-laki dan perempuan dalam menyelesaikan pendidikan tinggi, dengan perempuan memiliki kemungkinan lebih rendah untuk menyelesaikan pendidikan tinggi dibandingkan laki-laki.

Berbagai studi telah menyatakan bahwa faktor-faktor seperti tingkat kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, partisipasi sekolah, angka buta huruf, dan tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) sangat memengaruhi pembangunan gender. Perempuan di wilayah dengan kemiskinan tinggi cenderung memiliki akses

pendidikan dan pekerjaan yang lebih rendah. Sementara itu, tingkat literasi dan keterlibatan dalam pasar kerja juga menentukan sejauh mana perempuan mampu berdaya secara sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, dengan mengkaji hubungan antara variabel-variabel tersebut terhadap IPG, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah sekaligus masukan praktis bagi perumusan kebijakan pembangunan yang responsif gender di Provinsi Jambi. Dengan demikian, berdasarkan hal tersebut penulis melakukan penelitian dengan judul “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Gender Kabupaten dan Kota Di Provinsi Jambi”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah peneliti paparkan, maka rumusan masalah pada penelitian ini memuat:

1. Apakah tingkat kemiskinan berpengaruh negatif terhadap Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten dan Kota di Provinsi Jambi pada periode 2019-2023?
2. Apakah pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap IPG Kabupaten dan Kota di Provinsi Jambi pada periode 2019-2023?
3. Apakah Angka Partisipasi Sekolah (APS) di tingkat SMA/ sederajat berpengaruh positif terhadap IPG Kabupaten dan Kota di Provinsi Jambi pada periode 2019-2023?
4. Apakah Angka Buta Huruf (ABH) berpengaruh negatif terhadap IPG Kabupaten dan Kota di Provinsi Jambi pada periode 2019-2023?

5. Apakah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) berpengaruh positif terhadap IPG Kabupaten dan Kota di Provinsi Jambi pada periode 2019-2023?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Menganalisis pengaruh tingkat kemiskinan terhadap IPG Kabupaten dan Kota di Provinsi Jambi selama periode 2019-2023.
2. Menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap IPG Kabupaten dan Kota di Provinsi Jambi selama periode 2019-2023.
3. Menganalisis pengaruh angka partisipasi sekolah SMA/ sederajat terhadap IPG Kabupaten dan Kota di Provinsi Jambi selama periode 2019-2023.
4. Menganalisis pengaruh angka buta huruf terhadap IPG Kabupaten dan Kota di Provinsi Jambi selama periode 2019-2023.
5. Menganalisis pengaruh tingkat partisipasi angkatan kerja terhadap IPG Kabupaten dan Kota di Provinsi Jambi selama periode 2019-2023.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Menambah wawasan dalam studi gender mengenai upaya mencapai kesetaraan gender terhadap perempuan, dengan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kesetaraan dan keadilan gender tersebut.
2. Dapat menjadi bahan referensi untuk penelitian selanjutnya sebagai sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang kesetaraan dan keadilan gender.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Sebagai bahan pemikiran pemerintah terhadap peningkatan pemberdayaan perempuan untuk mengakhiri segala bentuk diskriminasi berbasis gender dan meningkatkan pembangunan gender yang lebih baik.
2. Serta sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan untuk mengatasi kesenjangan gender guna mencapai kesetaraan dan keadilan gender di Indonesia.